

**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MELAKSANAKAN
KEMITRAAN DENGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL GUNA PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS
ANAK DI KABUPATEN BANDUNG**

Gesha Ilyasa

Akbar

NPP.31.0359

Asdaf Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan

SipilEmail: 31.0359@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr H Romli Arsad, SH.,Mhum

ABSTRACT

Problem: *The Office of Population and Civil Registration plays a crucial role in implementing the protection of population documents for children, specifically through the Child Identity Card (KIA) program based on the Ministry of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards. Bandung Regency is one of the areas in Indonesia with a high child population. The Bandung Regency Education Office plays a significant role in ensuring children's access to education as desired. This is demonstrated by the partnership between the Bandung Regency Education Office and the Office of Population and Civil Registration.*

Objective: *This research aims to determine the role of the Bandung Regency Education Office in implementing the partnership with the Bandung Regency Office of Population and Civil Registration for the utilization of KIA, and to understand the efforts of the partnership between the Education Office and the Office of Population and Civil Registration in increasing the utilization of KIA in Bandung Regency.*

Method: *This research uses a qualitative descriptive method According to Arikunto (2010), descriptive research is used to investigate conditions or other matters that have been explained, and the results are presented in the form of research reports. The data collection techniques employed include interviews, observations, and documentation.*

Results: *The research findings indicate that the education office understands its roles and responsibilities in implementing the KIA partnership*

program with the office of population and civil registration, as stipulated in cooperation regulation No. 47/5268/Disdukcapil/2023. **Conclusion:** The roles played by the education office include conducting socialization activities for students from early childhood education (PAUD/TK) up to primary (SD) and secondary (SMP) levels, utilizing respective methods at each level. Thus, it is expected that the partnership can enhance KIA issuance to facilitate population data collection and ensure children's rights to obtain population documents such as identity cards. However, the implementation of the partnership between the two offices still faces challenges such as document requirement collection and human resources.

Keywords: Role, Partnership, KIA

ABSTRAK

Permasalahan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran penting dalam pelaksanaan perlindungan dokumen kependudukan bagi anak, yaitu program Kartu Identitas Anak (KIA) yang berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki populasi anak dengan jumlah yang tinggi. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung memiliki peran penting untuk memastikan akses anak-anak dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan kemitraan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan kemitraan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung guna pemanfaatan KIA, mengetahui upaya dari kemitraan antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam peningkatan pemanfaatan KIA di Kabupaten Bandung. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. (Arikunto, 2010) mengatakan bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mencari tau tentang keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah dijelaskan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi Adapun teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas pendidikan dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan kemitraan program KIA bersama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mana telah diatur dalam peraturan kerjasama No.47/5268/Disdukcapil/2023. **Kesimpulan :** Pelaksanaan peran yang ditunjukkan oleh dinas pendidikan yaitu melalui sosialisasi kepada para pelajar mulai dari tingkat Paud/TK, SD, dan SMP dengan metodenya masing-masing di setiap tingkat. Sehingga diharapkan kemitraan dapat meningkatkan pencetakan KIA guna mempermudah pendataan dan pemberian hak anak dalam memperoleh dokumen kependudukan berupa kartu identitas. Meskipun demikian, pelaksanaan kemitraan antara kedua dinas terkait tentunya tetap memiliki beberapa hambatan berupa pengumpulan persyaratan berkas dan sumber daya manusia

Kata Kunci : Peran, Kemitraan, KIA

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Keterlibatannya teknologi dalam pengelolaan administrasi dan pemberian pelayanan sangat di perlukan agar pelayanan itu sendiri menjadi lebih efisien (Hutasoit, 2024) Tujuan dari di terbitkannya Kartu Identitas Anak di Indonesia adalah untuk mempermudah pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang anak, seperti nama tanggal lahir alamat orang tua dan lainnya, selain bisa di gunakan oleh pemerintah Kartu Identitas Anak juga bisa di manfaatkan orang tua untuk keperluan anak seperti sekolah, berpergian, Kesehatan dan lainnya. Dalam Permendagri Nomer 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan dan memberikan nilai tambah dengan melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis dengan dinas lain dan juga transportasi, toko buku, tempat rekreasi dan sekolah guna memberikan pelayanan terbaik bagi anak itu semua berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Pentingnya peran Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kemitraan dengan program KIA merupakan sesuatu yang harus di perhatikan. Dinas Pendidikan memiliki peran untuk mengawasi, mendukung, dan melaksanakan berbagai aspek Pendidikan termasuk yang di perkuat oleh KIA Namun, dalam menjalankan peran tersebut, Dinas Pendidikan dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti perubahan kebijakan, sumber daya yang terbatas, sekolah yang belum melaksanakan pemanfaatan Kartu Identitas Anak, dan masalah administratif lainnya. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini memiliki tujuan mengkaji bagaimana Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kemitraan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Guna Pemanfaatan Kartu Identitas Anak, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mendukung pendidikan anak-anak melalui program ini Menurut (Louis dan David, 2002) kemitraan adalah kolaborasi antara dua perusahaan atau lebih perusahaan yang memiliki cita-cita bersama untuk saling membantu mencapai tujuan bersama

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari dan mengambil bahan referensi dari beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian pertama yang dilakukan oleh (Kemi Bonggoibo, 2022) yang berjudul Implementasi Pelayanan Kartu Identitas Anak Melalui Program Jemput Bola Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dalam penelitian ini metode yang digunakan deskriptif kualitatif, kesimpulan yang didapatkan jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan telah berjalan dengan baik, terlihat dari upaya yang dilakukan seperti peningkatan SDM, kerja sama dengan instansi lain,dan pemberian pelayanan terbaik melalui sarana dan prasarana. Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Alfi Syareza Barit, 2022) yang berjudul EfektivitasPelaksanaan Program Kartu Identitas Anak(Studi Kasus Di DinasKependudukanDan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah) Kesimpulan yang didapatkan Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito sudah cukup efektif, Penelitian ketiga oleh (Kumala Anggraeni Tamher, 2018) yang berjudul Implementasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual Maluku, Kesimpulan Hambatan yang terjadi dalam proses Implementasi SIAK,yaitu kurangnya sumber daya Manusia yang handal sehingga mampu

menggunakan alat informatika dengan maksimal. Penelitian keempat oleh (Damaira Islamiati B, 2019) yang berjudul Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Kotamobagu, hasil dari penelitian ini adalah Teknik analisis SWOT menjadi strategi guna memperluas jaringan Kerjasama dengan instansi terkait, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan model sosialisasi yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan APBD dalam mempercepat pelayanan KIA di KotaKotamobagu pada masa Covid-19. Penelitian kelima (Habibullah, 2022) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, Metode yang digunakan ialah Metode Kualitatif, Kesimpulan dalam penelitian ialah dalam menunjang efektivitas pelaksanaan program KIA di Kabupaten Bungo, Diperlukan adanya bentuk kerjasama sesuai dengan aturan, Yaitu pemanfaatan KIA dapat dimaksimalkan dengan membentuk kerjasama dengan pihak-pihak terkait khususnya di bisnis pada bidang tertentu

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Peran Dinas Pendidikan Dalam Melaksanakan Kemitraan Dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Guna Pemanfaatan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Bandung provinsi jawa barat, yang bertujuan untuk memudahkan peningkatkan kepemilikan kartu identitas anak dengan kontribusi kemitraan, metodenya yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat (Sutarto, 2009) ada 3 aspek peran yaitu 1. Konsepsi apa yang diharapkan, 2. Harapan bagaimana seorang harus bertindak, 3. Pelaksanaan atau perilaku seseorang seharusnya

1.5 Tujuan

Tujuan ini untuk mengetahui dan menganalisa penerapan peran Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Kemitraan guna meningkatkan kepemilikan kartu identitas anakserta memberikan Solusi dalam kendala pelaksanaan, Diharapkan kedepannya

dapat menjadi bahan referensi untuk membuat kebijakan

II. Metode

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam metode ini memiliki sifat yang menyesuaikan dengan kenyataan yang ada, Menurut Neuman (2014:13), Robert k. Yin (2011: 129) menyatakan dalam bukunya bahwa data merupakan dasar dari sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, mengumpulkan dan mengolah bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dapat mengembangkan teori selama proses pengumpulan data, serta bersifat fleksibel, Menurut Sugiyono (2019: 16) metode penelitian kualitatif disebut juga metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Menurut Simangunsong (2017: 190) lebih lanjut menggambarkan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bersifat “partisipatif dengan desain yang fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan gejala yang ditemukan di lapangan sesuai keadaan yang sebenarnya. Creswell (2010:270) membedakan dokumen menjadi dokumen publik dan dokumen privat. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Dinas Pendidikan dalam Pemanfaatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung

1. Konsepsi Peran Dinas Pendidikan

Dalam pelaksanaan Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diantaranya melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pendidikan. Hal ini juga tidak terlepas dari tugas dan wewenang yang dimiliki masing-masing instansi yang tertera pada PKS Nomor dimana kedudukan terhadap bagaimana yang harus dilakukan pada kondisi tertentu merupakan dasar agar pihak-pihak yang terlibat berperan dengan baik.

2. Harapan Peran

Harapan peran dari dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ini dalam pelaksanaan kemitraan dengan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Kartu Identitas Anak (KIA) ini untuk mendorong anak dari usia 4 tahun sampai dengan usia 14 tahun dari jenjang PAUD/TK sampai dengan SMP guna mempermudah pendataan dan pemberian hak anak dalam memperoleh dokumen kependudukan berupa kartu identitas. Dari harapan peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tersebut, peneliti melihat adanya sasaran dalam melaksanakan kemitraan tersebut, yaitu sasaran Dinas Pendidikan untuk membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memaksimalkan kepemilikan

3. Pelaksanaan Peran

Sesuai dengan PKS pasal 20 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Berhak melaksanakan kerjasama dengan pihak lain untuk pemanfaatan dan peningkatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung, dalam kemitraan ini Dinas Pendidikan membantu dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna pemanfaatan dan peningkatan pencetakan Kartu Identitas Anak. Kegiatan tersebut merupakan suatu perilaku Dinas Pendidikan dalam berpartisipasi untuk Kartu Identitas Anak dengan pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat, pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dinas pendidikan berupa kegiatan yang dilakukan dinas Pendidikan dalam pemanfaatan dan peningkatan pencetakan Kartu Identitas Anak

3.2. Hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan kemitraan dengan pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA).

1. Pengumpulan Persyaratan Berkas

Proses pengumpulan berkas persyaratan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) ini memiliki 2 berkas utama yang harus di kumpulkan oleh para pemohon yaitu kartu keluarga dan akta kelahiran pemohon Kartu Identitas Anak (KIA), dimana bidang Paud/Tk dan SD mengeluhkan tentang lama pengumpulan berkas dan jumlah berkasnya yang banyak dari pihak sekolah dikarenakan jumlah siswa yang membeludak sehingga

menyebabkan berkas tidak bisa di tampung di kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akhirnya menjadi kendala dalam proses pencetakan yang menyebabkan lamanya dan adanya dokumen yang hilang rusak dan lembab tidak bisa di baca.

2. Sumber Daya Manusia

Pekerja Dinas Pendidikan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Sudah memiliki tugasnya masing. Proses pengumpulan berkas ini sendiri menjadi kendala bagi Dinas Pendidikan di karenakan kekurangannya sumber daya yang menyebabkan adanya pekerjaan ganda selain tanggung jawabnya pada pekerjaan bidangnya dia juga menjadi penanggung jawab untuk mengkoordinir dokumen yang di kumpulkan. Selain Dinas Pendidikan kekurangan sumber daya manusia ini juga di alami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana pada proses pemeriksaan data dan juga proses pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) di kerjakan oleh pegawai mengakibatkan menumpuknya tugas yang mengakibatkan lamanya proses pencetakan.

3.3. Upaya Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dalam meningkatkan pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA)

1. Tempat Pengumpulan Dokumen Persyaratan

Memindahkan tempat pengumpulan dokumen persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi jenjang SD dimana persyaratan yang sudah ada di kumpulkan oleh pihak kecamatan SD setempat, sedangkan untuk jenjang Paud/TK pengumpulan data tetap di kantor Dinas Pendidikan dengan cara melalui Penilik dan Pengawas yang sudah di tunjuk oleh bidang Paud/TK dengan bertahap per 3 hari sekali.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia tambahan pada jenjang SD diambil oleh tingkat kecamatan dimana Kartu Identitas Anak akan di cetak di Kecamatan atas izin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sedangkan pada jenjang Paud/TK dengan adanya penilik dan pengawas yang telah di tunjuk oleh bidang Paud/TK memudahkan pengumpulan persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

3.4. Diskusi Temuan Penelitian Utama

Upaya peningkatan kartu identitas anak di setiap daerah memiliki caranya masing-masing, yang peneliti lakukan yaitu bagaimana upaya strategi peningkatan kepemilikan KIA dengan bermitra Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, hal tersebut bisa menjadi bahan referensi untuk kabupaten lainnya

IV. Kesimpulan

1. Peran Dinas Pendidikan dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan peran yang penting dimana dengan adanya kemitraan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung lebih mudah dalam melaksanakan sosialisasi ke anak umur 4-17 tahun dengan Dinas Pendidikan yang menjadi jembatan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada anak sekolah Paud/TK, SD, dan SMP. Selain itu Dinas pendidikan juga berkontribusi dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan cara menetapkan persyaratan melanjutkan sekolah dari jenjang Paud/Tk ke SD, dan SD ke SMP, lebih mudah dan praktis ketika pelajar memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Faktor penghambat dalam kemitraan Dinas Pendidikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung guna Kartu Identitas Anak (KIA), setiap dinas mempunyai hambatannya masing-masing dimana pada Dinas Pendidikan sendiri terbatas tempat untuk menyimpan Dokumen persyaratan dan jadinya mengakibatkan banyaknya dokumen yang rusak selain itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia. Sementara faktor penghambat yang ada dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yaitu Kurangnya tenaga ahli dalam

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu, idealnya membutuhkan setidaknya satu bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi lembaga hanya memberikan waktu dua minggu

Arah Masa Depan Penelitian : Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu peneliti berharap kedepannya bisa menjadi bahan referensi penelitian yang serupa

V. Ucapan Terimakasih

Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam

Negeri, Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ibu Dr. Imelda Hutasoit. M.Kes., M.A selaku Ketua Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr H Romli Arsad, SH., Mhum selaku Dosen Pembimbing atas dedikasinya yang tulus ikhlas dengan tanpa lelah membimbing dan membagikan ilmunya kepada peneliti dalam menyusun Skripsi ini, Seluruh Dosen Pengajar, Pelatih, Pamong Pengasuh, dan juga Civitas Akademika IPDN yang telah memberikan jasa serta dedikasinya dalam pembelajaran selama melaksanakan pendidikan, Keluarga Peneliti

VI. Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Creswell, John. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Louis dan David. (2002). *Pengantar Bisnis*. Jakarta. Erlangga
- Yin, R. K. (2011). *“Qualitative Research From Start to Finish”*. New York. London. The Guilford Press. Khansa Effendi Memadukan metode Kualitatif
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik Legalistik- Empirik-Inovatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Sutarto. (2009). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM press. Jeane neltje saly.
- Neuman. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. United States of America: Pearson.
- Hutasoit, Imelda (2017) *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Bandung: Alfabeta
- Kemi Bonggoibo, (2022). *Implementasi Pelayanan Kartu Identitas Anak Melalui Program Jemput Bola Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat*.
<http://eprints.ipdn.ac.id/13803/1/KEMI%20BONGGOIBO-JURNAL%20BARU.pdf>
- Barit, S. A. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (Studi*

Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Selatan Provinsi
Kalimantan Tengah).

<http://eprints.ipdn.ac.id/15527/>

Tamher, A.K. (2018). Implementasi SIAK di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tua

Maluku. <http://repository.ub.ac.id/165736/1/Kumala%20Anggraini%20Tamher.pdf>

Damaira Islamiati B (2022). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam Meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak di
Kota Kotamobagu. <http://eprints.ipdn.ac.id/8351/>

Habibullah. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA)
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bungo. <https://repository.unja.ac.id/40049/>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Kartu Identitas Anak

